

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan publik yang terencana termasuk di bidang kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mampu menjawab berbagai permasalahan kesehatan masyarakat (Putri & Handaruan, 2023). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Kesehatan yang berperan menyusun dan melaksanakan strategi pembangunan kesehatan di daerah. Peran tersebut menjadi penting dalam menghadapi berbagai permasalahan kesehatan terutama yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, seperti masalah gizi pada balita yang memerlukan penanganan secara terarah dan berkelanjutan (Zulkenedi et al., 2023).

Sejalan dengan peran tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjamin pemenuhan hak kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 34 ayat (3) ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagai landasan pembangunan kesehatan. Di tingkat daerah, tanggung jawab ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan masyarakat (Sahroji et al., 2022). Dinas Kesehatan juga berperan sebagai leading sector dalam mengoordinasikan

penanganan masalah kesehatan, termasuk masalah gizi pada anak yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan (Putra & Helmi, 2024).

Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, serta melaksanakan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan berfungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan sumber daya kesehatan, disertai evaluasi, pelaporan, dan administrasi dinas (Dinkes Lingga, 2026). Dalam upaya penanggulangan stunting, peran tersebut penting karena mendukung pelaksanaan program gizi dan pelayanan kesehatan ibu dan anak guna menurunkan prevalensi stunting di daerah. Permasalahan ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan kesehatan.

Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang masih menjadi fokus utama dalam pembangunan kesehatan di seluruh dunia. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang serta tingginya kemungkinan terkena penyakit infeksi, yang ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan dengan standar yang sesuai dengan usianya. Menyadari besarnya pengaruh stunting terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi di masa depan, World Health Assembly (WHA) melalui Resolusi WHA 65. 6 pada tahun 2012 mengesahkan Rencana Comprehensive Implementation Plan on Maternal, Infant and Young Child Nutrition, yang

mencakup enam sasaran gizi global, termasuk tujuan untuk mengurangi prevalensi stunting pada anak di bawah usia lima tahun sebesar 40 persen pada tahun 2025 (WHO, 2014).

Berdasarkan laporan Global Child Malnutrition Estimates tahun 2025, pada tahun 2024 terdapat 150,2 juta anak di bawah usia lima tahun di seluruh dunia yang mengalami stunting, 42,8 juta anak mengalami kekurangan gizi, dan 35,5 juta anak mengalami obesitas. Meskipun angka tersebut masih menunjukkan beban gizi yang signifikan, tren dunia menunjukkan penurunan yang stabil selama sepuluh tahun terakhir, dengan prevalensi stunting mencapai 23,2% di antara anak-anak di bawah lima tahun secara global pada tahun 2024 (Who, Unicef and World Bank, 2025). Fakta tersebut mengindikasikan bahwa upaya global dalam mencegah dan mengatasi stunting telah menunjukkan kemajuan, meskipun masih diperlukan peningkatan komitmen serta intervensi dari berbagai sektor untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh *World Health Assembly* pada tahun 2025.

Tabel 1. 1 Prevalensi Stunting Nasional Tahun 2021-2024

Tahun Survei	Sumber Data	Prevalensi Stunting Nasional	Penurunan dari Tahun Sebelumnya
2021	SSGI	24,4%	-
2022	SSGI	21,6%	2,8%
2023	SKI	21,5%	0,1%
2024	SSGI	19,8%	1,7%

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2021-2024 (telah diolah kembali)

Perkembangan serupa juga terlihat di Indonesia, di mana stunting masih menjadi salah satu permasalahan gizi utama yang berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berdasarkan Tabel 1.1 yang menyajikan data

Prevalensi Stunting Nasional periode 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan yang bervariasi. Pada tahun 2021, prevalensi stunting nasional, sebagaimana dicatat dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), berada pada angka 24,4% (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Setahun berikutnya, hasil SSGI tahun 2022 menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam program penurunan stunting, dengan prevalensi menurun drastis menjadi 21,6% (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Penurunan tersebut mencapai 2,8 poin persentase pada tahun tersebut. Namun, momentum penurunan yang cepat ini mengalami perlambatan substansial pada tahun 2023. Data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mengindikasikan bahwa angka prevalensi stunting relatif stagnan pada 21,5%, dengan penurunan yang marginal, yaitu hanya 0,1 poin persentase dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara kumulatif terjadi penurunan, laju reduksi stunting mulai menghadapi tantangan besar dan mendekati titik stagnasi pada akhir tahun 2023 (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Hasil terbaru SSGI tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di tingkat nasional kembali mengalami penurunan menjadi 19,8%, yang menandakan adanya upaya signifikan pemerintah dalam mempercepat penurunan kasus stunting melalui program konvergensi lintas sektor, seperti Gerakan Nasional Percepatan Penurunan Stunting (GN-PPS) (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Meskipun demikian, perbedaan antarprovinsi masih cukup besar, di mana beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur (37,9%), Sulawesi Barat, dan Papua Barat masih menunjukkan angka prevalensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata

nasional (Jati et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan stunting belum sepenuhnya teratasi secara merata dan memerlukan strategi penanganan yang lebih efektif, khususnya di tingkat daerah.

Sejalan dengan upaya membangun kesehatan nasional, pengurangan stunting pada balita dijadikan sebagai program utama pemerintah, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Target yang ditetapkan adalah mengurangi prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Dalam pelaksanaannya, Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Tingkat Pusat memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan kebijakan serta rekomendasi demi memastikan bahwa pelaksanaan percepatan penurunan stunting dapat berlangsung dengan efektif, terintegrasi, dan melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah (KSRI, 2020).

Komitmen pemerintah dalam percepatan penurunan stunting secara eksplisit dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan pada pentingnya kerja sama antara beberapa sektor (konvergensi lintas sektor) untuk mencapai target nasional (PPRI, 2021). Selain itu, landasan hukum lainnya didasari oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan dasar legal dan kewajiban bagi negara untuk menjamin hak kesehatan masyarakat termasuk penanggulangan masalah gizi (UURI, 2009). Kerangka ini kemudian dilengkapi dengan peraturan teknis di tingkat pelaksana seperti Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, yang menjadi pedoman teknis utama bagi intervensi gizi (PMKRI, 2014).

Metode pelaksanaan program kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, yang mendorong pelayanan kesehatan dilakukan secara langsung dan terpadu pada unit keluarga (PMKRI, 2016). Secara khusus, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit juga melengkapi kerangka ini, memastikan penanganan gizi yang komprehensif, terutama bagi anak yang mengalami masalah gizi karena penyakit penyerta (PMKRI, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pratama et al., 2024), Faktor-faktor yang berkaitan dengan kejadian stunting terdiri atas dua kelompok, yaitu faktor penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Faktor langsung meliputi asupan makanan yang mencakup energi, protein, lemak, dan zat gizi seperti zinc, riwayat berat badan lahir rendah (BBLR), penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan diare, serta pola pemberian makanan kepada anak.

Sementara itu, faktor tidak langsung mencakup riwayat pemberian ASI eksklusif, jenis kelamin balita, karakteristik keluarga seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, pelayanan kesehatan yang meliputi status imunisasi dan adanya kondisi Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil, serta sanitasi lingkungan yang berkaitan dengan kebersihan personal. Faktor-faktor tersebut juga

dapat menimbulkan dampak serius pada perkembangan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Muhammad et al., 2025).

Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan anak tumbuh lebih pendek dari rata-rata tinggi anak seusianya dan mengganggu perkembangan kognitif, yang berpotensi menurunkan kecerdasan anak. Sementara itu, dalam jangka panjang, stunting meningkatkan kerentanannya terhadap berbagai penyakit, seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, dan stroke. Dampak jangka panjang lainnya juga mencakup penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu negara, karena stunting berisiko menghasilkan generasi yang kurang sehat dan produktif (Agustina dalam Oktavia et al., 2024). Dengan demikian, meskipun terdapat tren penurunan angka stunting secara nasional, masih dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif dan berbasis konvergensi lintas sektor agar target penurunan stunting nasional dapat tercapai pada tahun 2024.

Sejalan dengan kondisi nasional tersebut, Provinsi Kepulauan Riau juga menghadapi dinamika serupa dalam upaya penurunan stunting. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, prevalensi stunting di provinsi ini menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada dua tahun terakhir. Angka stunting tercatat sebesar 17,6% pada tahun 2021, turun menjadi 15,4% pada tahun 2022, namun meningkat kembali menjadi 16,8% pada tahun 2023. Meskipun demikian, capaian ini masih lebih baik dibandingkan rata-rata nasional (21,5%) dan mencapai 95,2% dari target nasional sebesar 16% (Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2024).

Tabel 1. 2 Prevalensi Stunting se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

NO	Kabupaten Kota	2021	2022	2023	2024
1.	KARIMUN	17,6	13,3	17,9	21,4
2.	BINTAN	20	17,8	21,6	16,3
3.	NATUNA	17,8	18	16,1	18,5
4.	LINGGA	25,4	18,9	20,5	19,8
5.	KEPULAUAN ANAMBAS	21,7	14	15,2	15,8
6.	BATAM	17,5	15,2	16,1	14,0
7.	TANJUNGPINANG	18,8	15,7	15,2	12,9
	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	17,6	15,4	16,8	15,0

Sumber: Dinkes Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 (telah diolah kembali)

Persebaran kasus stunting antar kabupaten/kota menunjukkan variasi yang cukup mencolok. Pada tahun 2024, Kabupaten Karimun mencatat prevalensi tertinggi sebesar (21,4%), diikuti oleh Kabupaten Lingga sebesar (19,8%) dan Kabupaten Natuna sebesar (18,5%). Selanjutnya, Kabupaten Bintan berada pada angka (16,3%), diikuti Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar (15,8%). Sementara itu, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menjadi daerah dengan prevalensi terendah, masing-masing sebesar (14,0%) dan (12,9%). Secara umum, Kabupaten Karimun dan Natuna mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan Bintan, Lingga, Batam, dan Tanjungpinang menunjukkan tren penurunan. Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024 tercatat sebesar (15,8%). (Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2024).

Peningkatan angka stunting di beberapa daerah disebabkan oleh rendahnya frekuensi kunjungan posyandu, pemanfaatan sistem E-PPGBM yang belum optimal, dan ketimpangan tenaga kesehatan antarwilayah. Cakupan penimbangan balita telah mencapai 85,27%, sementara pemanfaatan E-PPGBM baru mencapai 91,21%, dengan hambatan utama pada keterbatasan jaringan internet dan tenaga

entri data, khususnya di Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah provinsi melaksanakan berbagai program intervensi spesifik dan sensitif, seperti Gerakan Cepat Penanganan Stunting (GERCEP ANTING) di Lingga dan Karimun, Aksi Bergizi bagi remaja putri, serta pencegahan Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil. Melalui kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Tim Penggerak PKK, program ini diharapkan mampu menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan di wilayah dengan angka tertinggi (Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2024).

Salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih menghadapi tantangan signifikan dalam penurunan stunting adalah Kabupaten Lingga. Masalah stunting balita di daerah ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penurunan stunting belum mencapai hasil yang optimal, terutama di wilayah Kecamatan Lingga. Menurut data dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Lingga, pada tahun 2025 kasus stunting masih ditemukan di seluruh kecamatan dengan tingkat sebaran yang bervariasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi penanganan stunting yang dilakukan Dinas Kesehatan harus lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Tabel 1. 3 Data Stunting Kabupaten Lingga Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Singkep Barat	76	31	33	93	56
2.	Singkep	110	45	55	72	46
3.	Singkep Selatan	21	12	10	8	4
4.	Singkep Pesisir	8	9	10	10	11
5.	Lingga	75	96	87	108	84
6.	Selayar	18	18	22	20	17

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
7.	Lingga Timur	43	43	48	63	41
8.	Lingga Utara	104	40	26	13	8
9.	Senayang	33	27	17	25	9
10.	Kepulauan Posek	20	33	15	13	14
11.	Temiang Pesisir	20	13	17	13	22
12.	Katang Bidare	31	9	20	13	8
13.	Bakung Serumpun	44	27	12	13	3
Jumlah		603	403	372	464	323

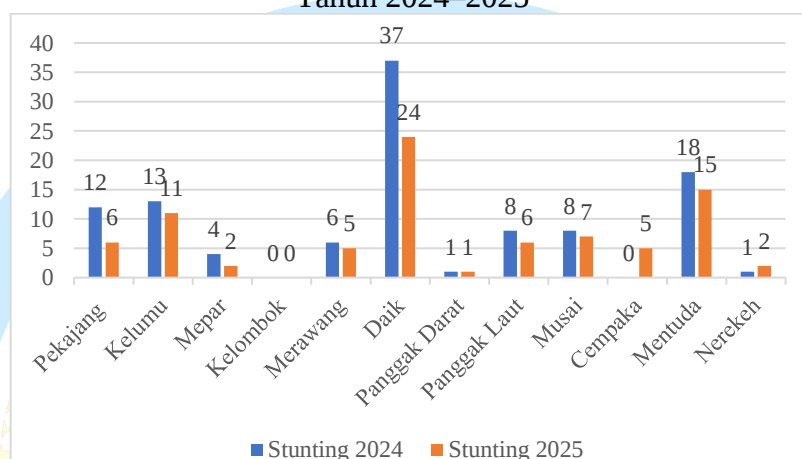
Sumber: DKP2KB Kabupaten Lingga Tahun 2025 (telah diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 1.3, perkembangan kasus stunting di Kabupaten Lingga selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang belum sepenuhnya stabil. Jumlah kasus stunting mengalami penurunan dari 603 kasus pada tahun 2021 menjadi 403 kasus pada tahun 2022, dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 372 kasus. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya dampak positif dari berbagai upaya pencegahan dan penanganan stunting yang telah dilaksanakan. Namun demikian, pada tahun 2024 jumlah kasus stunting kembali meningkat menjadi 464 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 323 kasus, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pengendalian stunting meskipun secara keseluruhan masih memperlihatkan pola yang fluktuatif (Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, 2025).

Data kasus stunting pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Lingga masih menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Pada tahun tersebut, Kecamatan Lingga tercatat memiliki 84 kasus stunting, diikuti oleh Kecamatan Singkep Barat dengan 56 kasus dan Kecamatan Singkep dengan 46 kasus. Sementara itu, kecamatan lain seperti Lingga Timur 41 kasus, Selayar 17 kasus, dan Senayang 9 kasus menunjukkan jumlah

kasus yang lebih rendah. Perbedaan jumlah kasus antara kecamatan ini mencerminkan variasi kondisi stunting di setiap wilayah, yang menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Lingga.

Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Stunting per Desa/Kelurahan di Kecamatan Lingga Tahun 2024–2025



Sumber: DKP2KB Kabupaten Lingga tahun 2026 (diolah peneliti).

Berdasarkan Gambar 1.1, sebaran kasus stunting di Kecamatan Lingga menunjukkan bahwa kasus tidak tersebar secara merata pada setiap desa/kelurahan. Kelurahan Daik merupakan wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, disusul Desa Mentuda dan Desa Kelumu. Di sisi lain, beberapa desa memiliki jumlah kasus yang relatif rendah bahkan tidak ditemukan kasus stunting. Perbedaan sebaran tersebut menunjukkan bahwa karakteristik permasalahan stunting di setiap desa berbeda sehingga diperlukan strategi pencegahan dan penurunan stunting yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Kecamatan Lingga dipilih sebagai lokasi penelitian.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kesehatan melaksanakan Program Intervensi Serentak Percepatan Penurunan Stunting yang dipusatkan di Posyandu Merak, Kelurahan Raya, Kecamatan Singkep Barat pada 5 Juni 2024. Kegiatan ini melibatkan 117 dari total 190 posyandu di Kabupaten Lingga dengan sasaran 5.422 balita, 512 ibu hamil, dan 71 calon pengantin (KL, 2024). Dinas Kesehatan Lingga juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap ibu hamil melalui pemberian asupan gizi seimbang, suplementasi vitamin penambah darah, serta edukasi gizi bagi remaja putri guna mencegah kekurangan energi kronis yang berisiko terhadap kehamilan dan tumbuh kembang anak (Muhammad, 2024).

Selain itu, kegiatan intervensi tersebut dirancang untuk dilaksanakan secara rutin setiap bulan guna memastikan seluruh sasaran memperoleh pemantauan status gizi dan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Lingga menyadari adanya tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan, sehingga menerapkan sistem pemantauan virtual dalam pelaksanaan intervensi secara serentak di seluruh kecamatan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjangkau seluruh sasaran secara lebih merata dan efisien. Berbagai upaya strategis tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lingga dalam menurunkan angka stunting melalui pendekatan konvergensi lintas sektor, penguatan peran Posyandu, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dari strategi Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penurunan stunting pada balita.

Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pada Pasal 5 ditetapkan bahwa target prevalensi stunting di Kabupaten Lingga sebesar 8% pada tahun 2024. Target tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka stunting. Namun, apabila dibandingkan dengan kondisi aktual yang masih menunjukkan angka stunting yang relatif tinggi dan cenderung fluktuatif, maka pencapaian target tersebut masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa permasalahan stunting masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan, khususnya di Kabupaten Lingga yang mencatat angka kasus cukup tinggi. Berbagai program telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, namun efektivitas strategi yang diterapkan dalam pencegahan dan penurunan stunting masih perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka stunting pada balita, khususnya di Kecamatan Lingga, serta sejauh mana upaya tersebut berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting di daerah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat judul **“Strategi Dinas Kesehatan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting pada Balita (Studi Kasus Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga Tahun 2025)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa fenomena yang telah dibahas di latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang penulis teliti adalah Bagaimana Strategi

Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penurunan stunting pada balita (Studi Kasus Kabupaten Lingga Kecamatan Lingga Tahun 2025)?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Strategi Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penurunan stunting pada balita (Studi Kasus Kabupaten Lingga Kecamatan Lingga Tahun 2025).

1.4 Manfaat Penelitian

Mengingat tujuan penelitian, peneliti cukup optimis bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Penulis bertujuan untuk menyajikan berbagai keuntungan dalam penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta dapat memberikan informasi terkait Strategi Dinas Kesehatan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting pada Balita (Studi Kasus Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun 2025). Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pemikiran tentang pentingnya Strategi Dinas Kesehatan dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami implementasi strategi Pencegahan dan Penurunan Stunting secara efektif, serta memberikan informasi ilmiah mengenai upaya Dinas Kesehatan dalam

pencegahan dan penurunan stunting pada balita di Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan konsep manajemen kesehatan masyarakat, khususnya pengendalian penyakit stunting di wilayah endemis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis mengenai penelitian ini ialah:

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait Bagaimana Strategi Dinas Kesehatan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting pada Balita (Studi Kasus Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun 2025) dan menjadi sumber referensi pengetahuan bagi mahasiswa.

2. Bagi Dinas Kesehatan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Dinas Kesehatan terhadap Strategi yang sudah dijalankan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting pada Balita (Studi Kasus Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Tahun 2025).